



**RENCANA KINERJA
(RENJA)
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Grafik	vii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
BAB II Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur	6
2.1. Struktur Organisasi	6
2.2. Tugas dan Fungsi	8
2.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	13
2.4. Tantangan dan Peluang.....	14
BAB III Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun Lalu	16
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2015	31
BAB IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	28
4.1. Permasalahan Bidang Cipta Karya	28
BAB V Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	31
5.1. Visi	31
5.2. Misi	32
5.3. Tujuan dan Sasaran	33
5.3.1. Tujuan.....	33
5.3.2. Sasaran	34
5.4. Strategi dan Arah Kebijakan.....	37
5.4.1 Strategi.....	37
5.4.2 Kebijakan.....	39

BAB VI Program dan Kebijakan	45
6.1. Program Pengembangan Perumahan	45
6.2 Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum	46
6.3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi	47
6.4 Program Perencanaan Tata Ruang	48
6.5 Program Pemanfaatan Ruang.....	49
6.6 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	49
BAB VII Rencana Anggaran, Indikator Kinerja dan Sasaran	51
BAB VIII Penutup	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan.....	13
Tabel 2.2.	Pangkat dan Golongan	13
Tabel 2.3.	Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	13
Tabel 5.1.	Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2014-2019	41
Tabel 5.2.	Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2014-2019	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur	7
--	---

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan hidayahNya semata, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2016.

Disusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan Implementasi dari Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang kemudian ditindak lanjuti Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara mulai dari Pejabat Eselon II keatas untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan yang berdasarkan tolok ukur Perencanaan Strategis.

Rencana Kerja (RENJA) ini memuat unsur-unsur Perencanaan Strategik dan Evaluasi Kinerja serta Analisis pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2016.

Akhirnya Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan dapat menjadi wujud pertanggungjawaban Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Visi dan Misinya sesuai Rencana Strategik Dinas.

Surabaya, 4 Desember 2015

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROPINSI JAWA TIMUR**

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO, SP, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19590109 198712 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja atau Rencana Kerja bagi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur merupakan dokumen perencanaan selama satu periode penganggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur sebagai wujud penjabaran Renstra (Rencana Strategis) dan juga acuan dalam melaksanakan kegiatan. Pedoman Renja yaitu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur 2014-2019, merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 90 dan 127 Tahun 2008. Renja sendiri merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan Daerah.

Penduduk Jawa Timur pada Tahun 2015 berjumlah 38.847.561 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,61% pertahun. Kepadatan Penduduk Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 adalah 804 jiwa per Km². Sedangkan rata-rata kepadatan penduduk Indonesia adalah 106 jiwa per Km², sehingga kepadatan penduduk Jawa Timur 8 (delapan) kali lipat kepadatan penduduk rata-rata nasional. Hal itu dapat ditinjau pula dengan membandingkan bahwa luas daratan Propinsi Jawa Timur 2,5 % dari luas wilayah Indonesia sementara jumlah penduduk Jawa Timur adalah ± 16 % dari total penduduk Indonesia.

Berdasarkan data-data tersebut diatas maka dapat dicermati bahwa penyebaran penduduk antar daerah Kabupaten/Kota menurut kepadatannya menunjukkan adanya pemusatan penduduk terutama di perkotaan, hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dan potensi wilayahnya. Terkait dengan permasalahan tersebut akan mengandung konsekwensi timbulnya masalah kesehatan, perumahan dan penyediaan berbagai prasarana pendukung yang diperlukan, sementara sumber daya alam cenderung semakin berkurang.

Mengingat permasalahan-permasalahan pokok dalam pembangunan sarana dan prasarana permukiman yang secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, maka penanganan bidang perumahan dan permukiman disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan pada pelaksanaan pembangunannya juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat Nasional maupun Propinsi.

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing-masing kegiatan keciptakaryaan dan penataan ruang. Serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu dokumen perencanaan

yang tidak dapat terlepas dari Subtansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunannya,

Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi peraturan perundangan yang bersumber dari adanya amanat UUD 1945 Bab XA Hak Azazi Manusia : *" Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan "*

Amanat UUD 1945 tersebut secara hierarki dijabarkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan-keputusan , yang antara lain meliputi :

a. Penataan Ruang :

- UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- PP No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

b. Perumahan & Permukiman

- UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
- UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman
- UU NO. 32 Tahun 2007 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

c. Penataan Bangunan & Jasa konstruksi

- UU No. 72 Tahun 1957 Tentang Rumah Negara
- UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanann Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) ini adalah :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selain itu Rencana Strategis ini mengacu kepada :

- RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019
- RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, khususnya Tahap Kedua (2010-2014) dan Tahap Ketiga (2015-2019);
- RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031.
- Renstra Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur ini adalah untuk memberikan gambaran informasi atas regulasi serta kebijakan dan strategi yang menjadi landasan penyusunan program pembangunan cipta karya dan tata ruang di Jawa Timur.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur ini adalah agar setiap pejabat dan staf pelaksana yang mempunyai tugas dan kewajiban serta tanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan

disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga Renja yang telah disusun dapat tercapai.

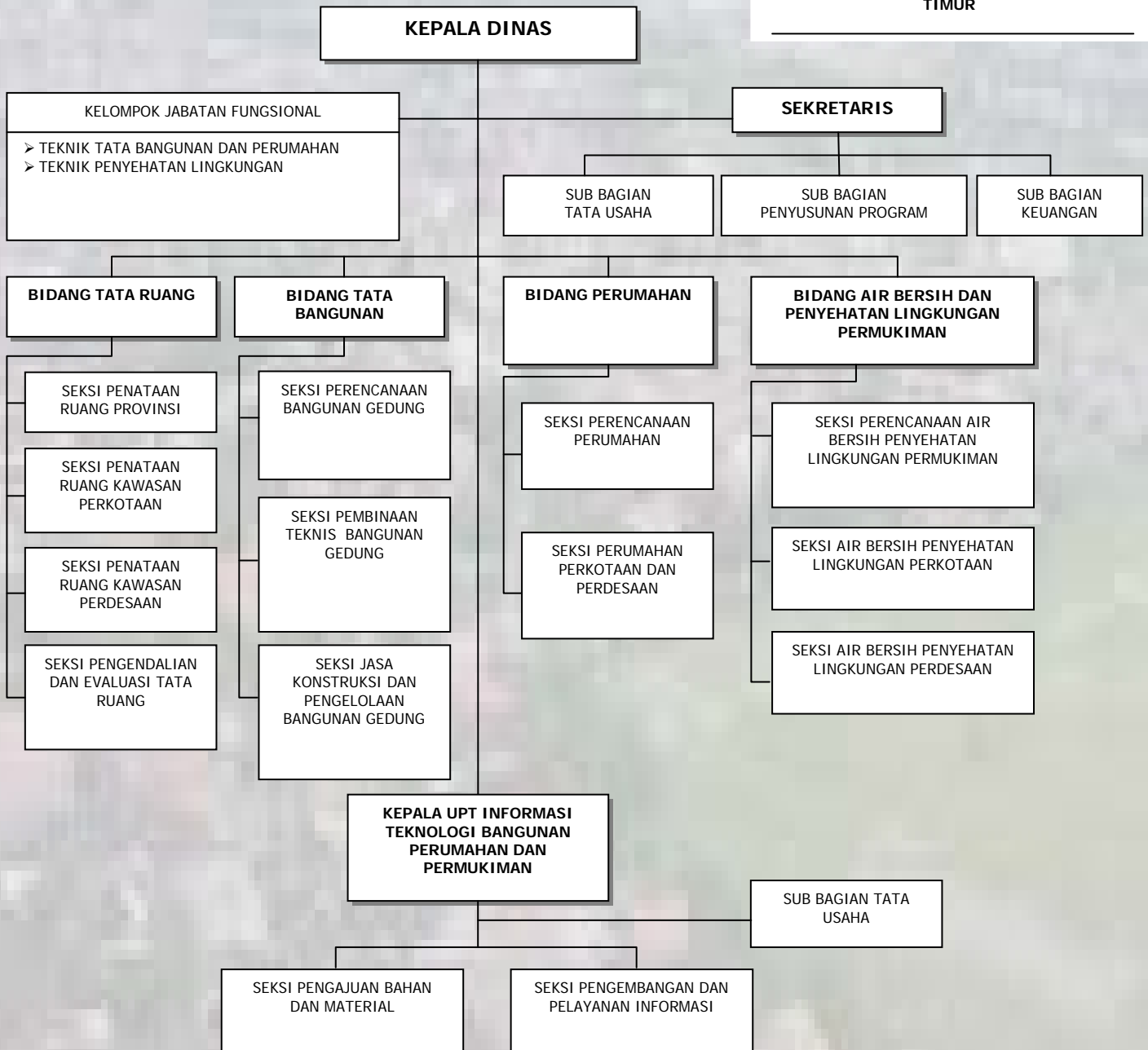
BAB II
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI JAWA TIMUR

2.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Provinsi Jawa Timur berdasarkan Perda No. 29/2008 Provinsi Jawa Timur terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Tata Ruang;
- d. Bidang Tata Bangunan;
- e. Bidang Perumahan;
- f. Bidang Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman Perkotaan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR



2.2. Tugas dan Fungsi

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di bidang Permukiman serta tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 09 Tahun 2008.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan, serta penyelenggaraan pembinaan, pengendalian teknis pembangunan permukiman;

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi keuangan
4. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
5. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan

7. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas tugas Bidang Dinas;

c. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penataan ruang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan pedoman pelaksanaan Norma Standart Prosedur Kriteria (NSPK) dan penetapan kriteria perubahan fungsi ruang lintas kabupaten atau kota dan kawasan strategis dalam rangka penyusunan tata ruang guna menjaga keseimbangan ekosistem sesuai kriteria yang ditentukan peraturan yang ada
2. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang lintas Kabupaten/Kota, kawasan strategis Provinsi dan Rencana Detail
3. Pelaksanaan koordinasi rencana rinci penataan ruang lintas Kabupaten/Kota
4. Pelaksanaan sosialisasi Norma Standart Prosedur Kriteria (NSPK), Standart Pelayanan Minimal (SPM), bimbingan, supervisi, pembinaan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan penataan ruang
5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi, penyebarluasan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat tentang penataan ruang tingkat Provinsi
6. Penyusunan dan penetapan rencana rinci/rencana detail tata ruang lintas Kabupaten/Kota dan kawasan strategis
7. Pemanfaatan ruang lintas Kabupaten/Kota dan kawasan strategis Provinsi dengan kerjasama pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha

8. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang
9. Perumusan kebijakan strategis operasional, program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan strategis dan lintas Kabupaten/Kota berdasarkan rencana rinci/rencana detail tata ruang lintas Kab/Kota dan kawasan strategis Provinsi
10. Pemberian izin pemanfaatan ruang, pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP
11. Pengembalian kewenangan, pemberian pertimbangan atau penyelesaian masalah yang tidak sesuai NSPM yang tidak bisa diselesaikan tingkat Kabupaten/Kota
12. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan ruang antar Kabupaten/Kota
13. Pelaksanaan pengawasan terhadap penataan ruang wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota

d. Bidang Tata Bangunan

Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang tata bangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara beserta lingkungannya mengacu pada norma, standart, prosedur, dan kriteria yang ada
2. Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara serta penataan bangunan dan lingkungannya
3. Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan rumah negara beserta lingkungannya

4. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

e. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang perumahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan kebijakan dan strategi Pengembangan perumahan
2. Pembinaan dan pengaturan bidang perumahan yang meliputi penyiapan produk dan sosialisasi peraturan serta pemberdayaan masyarakat
3. Pelaksanaan program Pengembangan perumahan dan prasarana sarana lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan
4. Pelaksanaan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa/Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAWA/RUSUNAMI) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi

f. Bidang Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman

Bidang Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitasi dalam rangka perencanaan pengembangan penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman di perkotaan, perdesaan, dan lintas Kabupaten/Kota

2. Pelaksanaan pembangunan, pengendalian, fasilitasi, pembinaan dan pemberian bantuan teknis dalam rangka peningkatan peran serta stakeholder didalam pengembangan penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman di perkotaan lintas Kabupaten/Kota

g. Unit Pelaksana Teknis Informasi Teknologi Bangunan Perumahan Dan Permukiman

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang informasi teknologi bangunan perumahan permukiman. Untuk melaksanakan tugas dimaksud UPT mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan penelitian, pengujian dan pengembangan teknologi, evaluasi analisis serta saran teknis bahan bangunan, srstruktur bangunan perumahan dan permukiman ;
2. Pengelolaan dokumentasi data dan layanan informasi, serta pembinaan tugas terhadap pelaku pembangunan perumahan dan permukiman;
3. Pelaksanaan tugas ketatausahaan UPT;
4. Pelaksanaan pelayanan masyarakat

2.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan

No	Nama SKPD	Kualifikasi Pendidikan								Jumlah	Keterangan
		SD	SLTP	SLTA	D1/D2	D3	D4/S1	S2	S3		
1	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata Ruang Provinsi Jawa Timur	2	5	85	0	8	97	46	2	245	
Jumlah		2	5	85	0	8	97	46	2	245	

Tabel 2.2. Pangkat dan Golongan

No	Nama SKPD	Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata Ruang Provinsi Jawa Timur	2	50	156	37	245	
Jumlah		2	50	156	37	245	

Tabel 2.3. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No	Nama SKPD	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata Ruang Provinsi Jawa Timur	25	-	25	
Jumlah		25	-	25	

2.4. Tantangan dan Peluang

Dengan perkiraan jumlah penduduk sebanyak 39.467.717 jiwa pada Tahun 2019, tantangan untuk dapat melayani seluruh penduduk semakin besar mengingat jumlah sumber daya alam sangat terbatas. Perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi dan global warming menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang layak, termasuk didalamnya pelayanan air bersih, sanitasi, drainase, dan persampahan. Perkembangan wilayah yang pesat dan besarnya arus urbanisasi menjadikan wilayah perkotaan menjadi semakin padat, pengendalian pemanfaatan ruang menjadi hal yang mutlak untuk melindungi kawasan lindung dan mengontrol pertumbuhan kawasan budidaya.

Berdasarkan data Susenas 2012, di Jawa Timur terdapat 9 Kab/Kota yang seluruh penduduknya sudah mengkonsumsi air bersih yaitu Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Batu, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Madiun, Kabupaten Madiun. Sedangkan kabupaten yang penduduknya masih mengkonsumsi air tidak bersih lebih dari 10% sebanyak 8 kabupaten, yaitu Kabupaten Pamekasan, Ponorogo, Sampang, Situbondo, Sumenep, Pacitan, Probolinggo, dan Trenggalek.

Secara umum rasio pelayanan infrastruktur air minum sampai tahun 2013 untuk perkotaan mencapai 47.13% dan perdesaan mencapai 56.24% data BPS

Masih adanya sumber-sumber mata air yang belum dimanfaatkan secara optimal, kerja sama antar daerah atau kawasan dalam pemenuhan pelayanan air bersih, sanitasi, dan persampahan menjadi peluang agar target pelayanan infrastruktur kecipa karya dapat tercapai. Untuk mempercepat perwujudan kondisi yang diinginkan diperlukan kerjasama dengan pihak swasta melalui CSR/PKBL, khususnya di bidang keciptakaryaan. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air minum dapat dilakukan antara lain dengan pengembangan pengelolaan air minum di masing-masing Kab/Kota maupun lintas wilayah (regional). Peluang pengembangan SPAM Regional di Jawa Timur antara lain :

- SPAM Regional Pantura, memanfaatkan Sungai Bengawan Solo (Kab. Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, dan Bangkalan)
- SPAM Regional Lintas Tengah, memanfaatkan Sungai Brantas (Kab./Kota Kediri, Nganjuk, dan Jombang)
- SPAM Regional Malang Raya, memanfaatkan mata air Ngepoh, Wendit, Waduk Karangates (Kab/Kota Malang, dan Kota Batu)
- SPAM Regional Umbulan, memanfaatkan mata air Umbulan (Kab/Kota Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, dan Kota Surabaya)
- SPAM Regional Lintas Madura, memanfaatkan waduk dan sungai (Kab. Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep)
- SPAM Regional Timur (Kab. Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi)
- SPAM Regional Selatan (Kab. Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung)

Rencana Tata Ruang yang telah disusun harus menjadi acuan dalam pembangunan, pemanfaatan ruang sesuai RTRW menjadi hal yang mutlak sehingga perkembangan wilayah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur Tahun 2015

Capaian Pelaksanaan Renja tahun 2015 dapat disajikan dalam bentuk realisasi anggaran yang telah tercapai dan juga hasil fisik pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang di Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Timur. Pada tahun 2015 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur mendapat total anggaran sebesar Rp. 202.652.007.000,- yang terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 18.868,907.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 183.783.100.000,-. Alokasi anggaran sebesar itu, untuk melaksanakan 10 program dan 36 kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 188.273.202.527,64 (92,9%). Rincian Capaian kinerja disajikan seperti dalam tabel berikut:

NO.	SASARAN RENJA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN a-1) YANG DIEVALUASI		RELISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)	
				7	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100			
1	2	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
I	Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal, serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100%	2.654.478.310	100,00%	2.643.419.900	100	99,58
1.1	Meningkatnya pelayanan publik	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	persentase meningkatnya kinerja aparatur terhadap pelaksanaan kegiatan	100%	2.654.478.310	100,00%	2.643.419.900	100	99,58
II	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	2.725.798.500	70,00%	2.622.485.992	100	96,21
2.1	meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana	persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana perkantoran	70%	2.725.798.500	70,00%	2.622.485.992	100	96,21

III	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	882.780.000	100,00%	844.411.504	100	95,65
3.1	meningkatnya koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	persentase pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%	755.900.000	100,00%	744.485.604	100	98,49
3.2	meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pelaksanaan peningkatan SDM Aparatur	50%	126.880.000	50,00%	99.925.900	100	78,76
IV	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	39.550.000	100%	38.912.500	100	98,39
4.1	menyusun laporan kinerja pemerintah (Lakip) dan rencana strategis (renstra)	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan	jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	5	39.550.000	5,00	38.912.500	100	98,39
V	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi	Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah	73,46%	7.587.215.490	73,46%	7.385.383.644	100	97,34

5.1	meningkatnya sarana dan prasarana air limbah di perkotaan dan perdesaan	Penyediaan Sarana Air Limbah	persentase kk/rt dengan layanan air limbah yang aman	73,46%	1.208.004.000	73,46%	1.197.322.690	100	99,12
5.2	menurunkan lama genangan pada daerah rawan banjir	Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air/Plengsengan/Drainase	terbangunnya saluran drainase untuk mengurangi genangan didaerah yang sering tergenang air hujan	81,37%	6.379.211.490	81,37%	6.188.060.954	100	97,00
VI	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum	Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	62,96%	14.334.726.000	62,96%	14.139.667.392	100	98,64
6.1	meningkatnya sarana dan prasarana air bersih di perkotaan dan perdesaan	Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan	Persentase KK yg dapat layanan air bersih layak	62,96%	12.918.626.000	62,96%	12.765.466.202	100	98,81
6.2	meningkatnya sarana dan prasarana air bersih di desa-desa rawan air	Pendataan dan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Air	jumlah dokumen pendataan/pemetaan desa-desa rawan air	10	1.416.100.000	10	1.374.201.190	100	97,04
VII	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rusun Terbangun	44,26%	147.959.104.200	44,26%	136.270.526.650	100	92,10

			Jumlah PSU Perumahan Permukiman dan Dokumen Monev RTLH	10		22		220	
7.1	meningkatkan penyediaan rumah bagi KK masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan PSU	Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar	Jumlah PSU yang dibangun (kasawasan)	17.500	11.056.972.100	19.141,23	10.349.070.795	109,38	93,60
7.2	meningkatnya kesejahteraan masyarakat usaha tani	Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan/ Perbaikan sarana prasarana kawasan Agropolitan Jawa Timur	Jalan usaha tani yang dibangun	3.790	1.850.301.000	3.789,61	1.820.469.415	99,99	98,39
7.3	meningkatnya sarana prasarana infrastruktur lingkungan permukiman	Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman	Panjang jalan lingkungan yang dibangun	18.166	10.843.783.000	19.725	10.689.012.875	109	98,57
7.4	meningkatnya prasarana dan sarana pada kawasan permukiman dan kawasan khusus	Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kawasan Khusus	Panjang jalan lingkungan yang dibangun	1.625	2.864.455.000	1.625	1.682.882.620	100	58,75
7.5	meningkatnya penyediaan rusunawa bagi MBR	Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	persentase rusunawa yg dihuni oleh kepala keluarga yg berhak	80%	20.453.101.900	80,00%	16.710.907.430	100	81,70

7.6	meningkatnya kualitas pelaksanaan PNPM perkotaan , PPIP perdesaan	Dana Pendampingan PNPM	jumlah OMS dan BKM yang mengikuti pendampingan PPIP maupun PNPM perkotaan	36	1.364.850.000	36	1.267.600.600	100	92,87
7.7	peningkatan kualitas gedung kantor dan kenyamanan kerja pegawai	Pembangunan/Rehabilitasi bangunan Gedung Pemerintah Propinsi Jatim	jumlah gedung negara yang dibangun/direnovasi	20	91.842.065.200	20,00	86.825.861.480	100	94,54
7.8	terlaksananya pendampingan RTLH	Pendampingan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur	jumlah dokumen /laporan pengawasan RTLH	20	1.331.200.000	20,00	1.242.558.625	100	93,34
7.9	meningkatnya penelitian dan pengujian bahan dan struktur bangunan perumahan dan permukiman	Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman	jumlah penelitian teknologi tepat guna	10	1.884.718.500	10,00	1.751.946.860	100	92,96
7.10	meningkatnya pengembangan data dan informasi bidang perumahan dan permukiman	Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman	jumlah penyebaran informasi dan data bidang perumahan dan permukiman	6	1.465.410.500	6	1.321.913.880	100	90,21
7.11	meningkatnya pelatihan dan sertifikasi bidang jasa konstruksi bagi masyarakat pekerja konstruksi	Pendidikan Masyarakat Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi	jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan dan sertifikasi bagi pekerja konstruksi	500	1.161.575.000	690	802.971.440	138	69,13

7.12	tersusunnya program kebutuhan infrastruktur pada wilayah perbatasan	Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan	jumlah dokumen identifikasi sarana prasarana pada kawasan perbatasan	5	728.000.000	5	716.966.930	100	98,48
7.13	tersusunnya program kebutuhan infrastruktur pada kawasan cepat tumbuh	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	jumlah dokumen identifikasi sarana prasarana infrastruktur pada wilayah strategis dan cepat tumbuh	5	693.000.000	5	677.460.200	100	97,76
7.14	tersusunnya program kebutuhan infrastruktur pada kawasan pesisir	Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir	jumlah dokumen identifikasi sarana prasarana pada kawasan pesisir	3	419.672.000	3	410.903.500	100	97,91
VIII	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang tersusun	69,23%	4.082.500.000	62,32%	3.707.519.155	90,01	90,81
			Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang Kab/Kota	7		14		200	
8.1	tersusunnya perda kawasan strategis provinsi	Rapat koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	persentase perda kawasan strategis provinsi	100%	252.000.000	105,76%	228.789.480	105,76	90,79
8.2	meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang yg dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian masyarakat	Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi	persentase Jumlah Persetujuan Substansi KSP di Jawa Timur	22,22%	2.230.500.000	22,22%	2.061.085.050	100	92,40

8.3	tersusunnya rencana rinci kawasan strategis	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi	persentase terpenuhinya RTR kawasan strategis di jatim	58,97%	1.600.000.000	58,97%	1.417.644.625	100	88,60
IX	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang	20%	2.869.275.000	56,45%	2.473.737.660	282,24	86,21
9.1	terwujudnya perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang penataan ruang	Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang	persentase terpenuhinya kebutuhan buku pedoman norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang	10%	225.000.000	10,00%	186.547.260	100	82,91
9.2	terwujudnya 38 buah peta RDTR dan peta LP2B Kabupaten/kota di Jawa Timur	Survey dan Pemetaan	Persentase jumlah peta RDTR dan Peta LP2B Kabupaten/Kota di Jawa Timur	15,79%	2.184.700.000	15,79%	1.890.838.515	100	86,55
9.3	meningkatnya pemahaman Sumber Daya Manusia terkait NSPK pemanfaatan ruang	Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar Prosedur dan manual Pemanfaatan Ruang	persentase tercapainya sosialisasi kebijakan NSPK pemanfaatan ruang	100%	188.490.000	100,00%	139.575.550	100	74,05
9.4	terfasilitasinya permasalahan terkait pemanfaatan ruang di kabupaten/kota	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota	persentase jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi permasalahan terkait pemanfaatan ruang	100%	271.085.000	100,00%	256.776.335	100	94,72
X	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	100%	647.672.500	100%	545.059.941	100,00	84,16
10.1	terwujudnya evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase terpenuhinya kebutuhan dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	100%	150.000.000	100,00%	118.812.220	100	79,21

10.2	meningkatnya pemahaman Sumber Daya Manusia aparat pengendalian pemanfaatan ruang	Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase Aparat pengendalian pemanfaatan ruang yang terlatih	100%	85.035.000	100,00%	75.360.035	100	88,62
10.3	terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang di kab/kota	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	jumlah dokumen laporan survey	1	150.000.000	100,00%	125.088.681	100	83,39
10.4	terfasilitasinya permasalahan terkait pengendalian pemanfaatan ruang di kabupaten/kota	Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota	persentase jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi permasalahan terkait pengendalian pemanfaatan ruang	100%	90.387.500	100,00%	73.435.000	100	81,24
10.5	meningkatnya pemahaman Sumber Daya Manusia terkait kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase jumlah peserta yang mendapat sosialisasi tentang kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	100%	72.250.000	100,00%	69.750.000	100	96,54
10.6	terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait penataan ruang	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	jumlah laporan Monitoring dan evaluasi penataan ruang di Jawa Timur	1	100.000.000	100,00%	82.614.005	100	82,61

Hasil Capaian Pembangunan
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Jawa Timur

Judul	Tahun 2014		Triwulan I Tahun 2015	Triwulan II Tahun 2015	Triwulan III Tahun 2015	Triwulan IV Tahun 2015
	Capaian Kinerja	Rincian Pembangunan	Capaian Kinerja	Rincian Pembangunan	Rincian Pembangunan	Rincian Pembangunan
Prosentase penduduk yang mendapat sarana & prasarana perumahan air bersih di pedesaan	57,97%	Perpipaan = 47.567 meter Hidran Umum = 11 Unit Bangunan Produksi = 42 Unit Melayani berapa = 9.303 Jiwa	57,97%	Perpipaan = 18.699 meter Hidran Umum = 21 Unit Bangunan Produksi = 24 Unit Melayani berapa = 5.217 Jiwa	Perpipaan = 36.333 meter Hidran Umum = 22 Unit Bangunan Produksi = 30 Unit Melayani berapa = 8.276 Jiwa	Perpipaan = 66.267 meter Hidran Umum = 36 Unit Bangunan Produksi = 42 Unit Melayani berapa = 14.645 Jiwa
Prosentase penduduk yang harus terlayani sarana dan prasarana air bersih di perkotaan	66,76%	Perpipaan = meter Hidran Umum = Unit Bangunan Produksi = Unit Melayani berapa = Jiwa	66,76%	Perpipaan = 0 meter Hidran Umum = 0 Unit Bangunan Produksi = 0 Unit Melayani berapa = 0 Jiwa	Perpipaan = 0 meter Hidran Umum = 0 Unit Bangunan Produksi = 0 Unit Melayani berapa = 0 Jiwa	Perpipaan = meter Hidran Umum = Unit Bangunan Produksi = Unit Melayani berapa = Jiwa
Prosentase penduduk yang harus terlayani sarana dan prasarana air limbah di pedesaan	46,59%	MCK terbangun = 8 Unit Melayani berapa = 400 Jiwa IPAL Komunal =Unit IPAL Kawasan =Unit IPAL Terpusat =Unit	46,59%	MCK terbangun = 3 Unit Melayani berapa = 500 Jiwa IPAL Komunal =Unit IPAL Kawasan =Unit IPAL Terpusat =Unit	MCK terbangun = 3 Unit Melayani berapa = 500 Jiwa IPAL Komunal =Unit IPAL Kawasan =Unit IPAL Terpusat =Unit	MCK terbangun = 8 Unit Melayani berapa = 1000 Jiwa
Prosentase penduduk yang harus terlayani sarana dan prasarana air limbah di perkotaan	78,09%	MCK terbangun = 15 Unit Melayani berapa = 375. 100Jiwa IPAL Komunal = 15 Unit IPAL Kawasan = 6 Unit IPAL Terpusat = 0 Unit	78,09%	MCK terbangun =Unit Melayani berapa =Jiwa IPAL Komunal =Unit IPAL Kawasan =Unit IPAL Terpusat =Unit	MCK terbangun =Unit Melayani berapa =Jiwa IPAL Komunal =Unit IPAL Kawasan =Unit IPAL Terpusat =Unit	MCK terbangun = 30 Unit Melayani berapa =Jiwa IPAL = 26 Unit

Prosentase penduduk yang harus terlayani sarana dan prasarana Drainase Pedesaan%	Saluran = 9.851,22 meter Melayani berapa =Jiwa Melayani berapa = 16,42 Ha%	Saluran =meter Melayani berapa =Jiwa Melayani berapa =Ha	Saluran = 7.804 meter Melayani berapa = 3.902 Jiwa Melayani berapa = 13 Ha	Saluran = 8340 meter Melayani berapa = 4.170 Jiwa Melayani berapa = 14 Ha
Presentasi penduduk yang harus terlayani sarana dan prasarana drainase perkotaan	79,96%	Saluran = 5.626 meter Melayani berapa =Jiwa Melayani berapa = 197 Ha	79,96%	Saluran =meter Melayani berapa =Jiwa Melayani berapa =Ha	Saluran = 0 meter Melayani berapa = 0 Jiwa Melayani berapa = 0 Ha	Saluran = meter Melayani berapa = Jiwa Melayani berapa = Ha
Capaian Pelayanan Persampahan	82,96%	TPS = 8 Unit TPA = 5 Unit	82,96%	TPS =Unit TPA =Unit	TPS = 26 Unit TPA = 0 Unit	TPS = 26 Unit TPA = 1 Unit
Capaian Pelayanan Kawasan Kumuh		3.204,37 Ha	3.204,37 Ha	3.204,37 Ha	3.204,37 Ha	3.172,23 Ha
Luas Kawasan Industri		315.505,3 Ha	315.505,3 Ha	315.505,3 Ha	315.505,3 Ha	315.505,3 Ha
Luas ruang terbuka hijau		523.254,58 Ha	523.260,58 Ha	523.266,58 Ha	523.272,58 Ha	523.272,58 Ha

Rencana Peruntukan	1.916.921 Ha	1.916.921 Ha	2.008.453 Ha	2.008.435 Ha	2.008.435 Ha
Realisasi RTRW	37 Perda	37 Perda	37 Perda	38 Perda	38 Perda
Luas seluruh wilayah budidaya	1.177.421 Ha	1.177.421 Ha	1.177.421 Ha	1.177.421 Ha	1.177.421 Ha
Luas wilayah perkotaan	542.770,48 Ha	542.770,48 Ha	542.770,48 Ha	542.770,48 Ha	542.770,48 Ha
Backlog Rumah	468.361 Unit	468.361 Unit	459.209 Unit	459.209 Unit	459.209 Unit
Realisasi Perbaikan RTLH	7.660 Unit	0 Unit	5832 Unit	12.000 Unit	12.141 unit
Realisasi Rusunawa	21.003 Unit	0 Unit	396 Unit	396 Unit	1.689 Unit
Realisasi RTS/RSH	170.222 Unit	0 Unit	9152 Unit	9152 Unit	9.457 Unit
Jalan Lingkungan	13.732,61 Meter	0 Meter	21.448,47 Meter	11.679,66 Meter	2.059,84 Meter
Saluran Gorong-gorong	5.824,1 meter	0 meter	3.085,82 meter	5.822,21 meter	1.138,41 meter

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Bidang Cipta Karya

Permasalahan bidang perumahan dan permukiman meliputi : rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, serta menurunnya kualitas permukiman dengan masih besarnya luasan kawasan kumuh diperkotaan. Adapun permasalahan pokok air bersih meliputi: rendahnya peningkatan pelayanan air minum di perkotaan dan perdesaan, dan daerah rawan air. Sedangkan permasalahan pokok air limbah adalah masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage), serta belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah. Persampahan meliputi : masih rendahnya tingkat capaian pelayanan sampah di perkotaan, serta masih lemahnya manajemen dan operasional teknis pengelolaan sampah terutama pada TPA. Permasalahan Drainase adalah masih luasnya daerah genangan serta banyak terjadinya banjir di kawasan perkotaan.

Dibidang penataan bangunan terdapat permasalahan mendasar yaitu masih rendahnya penegakan aturan keselamatan bangunan, serta masih diperlukannya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung. Perkembangan perkotaan yang tidak seimbang, antara kota-kota metropolitan/besar dengan kota-kota menengah dan kecil serta memburuknya kualitas fisik kawasan perkotaan , dan menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan karena keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar perkotaan yang banyak dipicu oleh adanya tingkat urbanisasi yang tinggi.

Adapun permasalahan pokok dalam bidang penataan ruang adalah; belum tersedianya rencana rinci tata ruang (Kawasan strategis dan rencana detail tata ruang), belum optimalnya perwujudan NSPK Bidang Penataan

Ruang, dan belum optimalnya Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pembangunan di daerah.

Permasalahan bidang Cipta Karya secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

a. Permasalahan bidang Perumahan

- Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau
- Menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan
- Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST & Kawasan permukiman perdesaan

b. Permasalahan bidang Pekerjaan Umum

- Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan, dan daerah rawan air
- Belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan
- Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan system air limbah terpusat (system sewerage)
- Belum optimalnya pengurangan genangan banjir di kawasan perkotaan

c. Permasalahan bidang penataan ruang

- Belum tersedianya Rencana Rinci Tata Ruang (Kawasan strategis&rencana detil Tata Ruang)
- Belum optimalnya RTRW sebagai acuan pembangunan di daerah
- Belum optimalnya perwujudan NSPK Bidang Penataan Ruang

4.2. Isu-Isu Strategis

- *Isu internasional terkait dengan Air diantaranya* adalah:
 - a) Pencapaian target MDG's 2015 untuk sektor Air Minum dan Sanitasi di perkotaan dan pedesaan.
 - b) Sesuai dengan tujuan pembangunan millenium (MDG's) bahwa Program Pengelolaan Sumber Daya Air harus mendukung untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem serta untuk memastikan kelestarian lingkungan

- *Isu strategis infrastruktur:*
 - Percepatan penurunan angka Backlog perumahan melalui pembangunan Rusun Sewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan penyediaan PSU Perumahan
 - ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat masih memerlukan perhatian dan percepatan, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan serta sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman.

- *Isu Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)*

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai matra spasial pembangunan belum diacu dalam implementasinya oleh berbagai sector sehingga berdampak pada pengembangan wilayah yang tidak terkendali. Hal ini ditandai dengan meningkatnya dinamika alih fungsi lahan produktif, sehingga perlu adanya pengawalan terhadap pemanfaatan ruang serta perumusan instrument pemngendalian pemanfaatan ruang dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan RTRW yang telah ditetapkan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Propinsi Jawa Timur maka Visi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur adalah:

***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA MELALUI
PEMBANGUNAN BIDANG KECIPTAKARYAAN YANG LEBIH
BERKEMBANG DAN PENATAAN RUANG YANG BERKELANJUTAN”***

Adapun makna dari Visi sebagai berikut :

Masyarakat sejahtera, yaitu terwujudnya masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman.

Pembangunan Bidang Keciaptakaryaan yang lebih berkembang, yaitu Pembangunan bidang keciptakaryaan yang lebih menyeluruh menyangkut aspek infrastruktur permukiman dalam usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, dengan mengembangkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan untuk mewujudkan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan.

Penataan Ruang yang berkelanjutan, yaitu Perencanaan strategis untuk mencapai visi kelestarian lingkungan yang selaras dengan pembangunan sosial ekonomi dalam bentuk regulasi tata ruang yang mengikat, sekaligus praksis pembangunan yang komprehensif untuk mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Sehingga tercipta tempat bermukim yang asri, nyaman, dan aman bagi masyarakat untuk jangka panjang.

5.2 Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang ditempuh melalui 3 misi, yaitu :

Misi pertama : Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman dan teratur.

Misi ini untuk mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan akses terhadap rumah yang layak huni terjangkau serta pembangunan Rusunawa terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Misi kedua : Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat.

Misi ini untuk mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan akses terhadap air minum dan peningkatan penyehatan lingkungan seperti sanitasi, drainase, dan persampahan.

Misi ketiga : Memberikan arah pemanfaatan ruang yang mantap melalui penyusunan perencanaan dan pengendalian Tata Ruang yang lengkap dengan dilandasi oleh legalitas hukum.

Misi ini untuk mewujudkan penataan ruang yang selaras dengan kelestarian lingkungan sekaligus praksis pembangunan yang komprehensif untuk mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Sehingga tercipta tempat bermukim yang asri, nyaman, dan aman bagi masyarakat untuk jangka panjang.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi Dinas Permukiman yang spesifik dan terukur dalam pembangunan jangka menengah bidang permukiman. Berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2015-2019, maka tujuan pembangunan bidang keciptakarya dan penataan ruang secara garis besar terkait pada 4 (empat) prioritas, yaitu:

1. Meningkatkan penyediaan rumah bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
2. Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih dan sanitasi yang layak
3. Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang

5.3.1 Tujuan

A. Tujuan Meningkatkan penyediaan rumah bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

- a. Mengurangi backlog rumah
- b. Meningkatkan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- c. Penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)
- d. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan/permukiman yang lebih baik
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni serta menghadapi perdagangan bebas (AFTA 2015) di bidang konstruksi
- f. Menciptakan lingkungan permukiman yang ramah lingkungan melalui teknologi bidang perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan
- g. Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan infrastruktur pada wilayah tertentu

h. Peningkatan kualitas gedung negara

B. Tujuan Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih dan sanitasi yang layak

- a. Memenuhi Hak Dasar Masyarakat atas air bersih/minum
- b. Meningkatkan pelayanan air bersih
- c. Mengetahui potensi, masalah dan kebutuhan air bersih diwilayah-wilayah tertentu, khususnya daerah rawan air
- d. Memenuhi Hak Dasar Masyarakat atas Sanitasi yang layak
- e. Meningkatkan pelayanan drainase dan persampahan
- f. Mengetahui potensi, masalah dan kebutuhan sanitasi di wilayah-wilayah tertentu
- g. Meningkatkan pelayanan air limbah

C. Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang

Meningkatkan penataan ruang yang selaras dengan kelestarian lingkungan sekaligus praksis pembangunan yang komprehensif untuk mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Sehingga tercipta tempat bermukim yang asri, nyaman, dan aman bagi masyarakat untuk jangka panjang.

5.3.2 Sasaran

Sasaran pembangunan bidang keciptakaryaan didasari oleh target capaian pelayanan yang ideal sesuai dengan referensi maupun regulasi yang relevan, yaitu dengan perhitungan yang berbasis MDGs dan SPM.

A. Pengembangan perumahan

Sasaran Pengembangan Perumahan di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015 sampai dengan 2019 , adalah :

- Menurunnya jumlah backlog perumahan
- Meningkatnya presentase masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki akses rumah layak huni
- Meningkatnya pembangunan Rusunawa
- Meningkatnya jumlah renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman pada kawasan permukiman Pembangunan PSU dan kawasan khusus
- Meningkatnya dukungan prasarana dan sarana dikawasan agropolitan
- Meningkatnya pelatihan dan sertifikasi bisang jasa konstruksi bagi masyarakat pekerja konstruksi
- Meningkatnya kualitas pelaksanaan PNPM Perkotaan dan PPIP Perdesaan
- Meningkatnya pengembangan teknologi dan informasi bidang perumahan dan permukiman
- Meningkatnya penelitian dan pengujian bahan dan struktur bangunan perumahan dan permukiman
- Meningkatnya kualitas gedung negara.
- Tersusunnya program kebutuhan infrastruktur terutama di bidang keciptakaryaan.

B. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

Sasaran Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015 sampai dengan 2019 , adalah :

- Meningkatnya sarana dan prasarana air bersih di desa-desa rawan air.
- Meningkatnya sarana dan prasarana AB di perkotaan dan perdesaan
- Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum

C. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi

Sasaran Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015 sampai dengan 2019 , adalah :

- Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah
- Tersusunnya program kebutuhan infrastruktur bidang keciptaan karya
- Mengoptimalkan saluran drainase sebagai pematus air hujan
- Meningkatnya kinerja pengelolaan drainase
- Meningkatnya sarana prasarana persampahan
- Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah

D. Sasaran Penataan Ruang

Sasaran penataan ruang yang akan dicapai sampai tahun 2019 adalah:

- Terwujudnya perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang penataan ruang
- Meningkatnya Jumlah RTR Kawasan Strategis Provinsi
- Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang

5.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi dilaksanakan berpedoman pada strategi yang menjadi landasan utama pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019.

5.4.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis dan rasional serta komprehensif, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program.

A. Strategi Pengembangan Perumahan

- a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak khususnya bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah
- b. Pembangunan Sarana Utilitas (PSU)
- c. Pembangunan jalan usaha tani
- d. Pendidikan dan pelatihan kemasyarakatan produktif melalui jasa konstruksi
- e. Pendampingan dan evaluasi PNPM dan PPIP
- f. Pengembangan teknologi dan informasi serta pengembangan laboratorium perumahan dan permukiman
- g. Renovasi gedung Negara

- h. Menyelenggarakan studi-studi inventarisasi potensi, permasalahan dan kebutuhan infrastruktur permukiman

B. Strategi Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum

- a. Pendataan dan Pemetaan desa-desa rawan air
- b. Pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah rawan air
- c. Pengembangan sistem penyediaan air minum regional
- d. Peningkatan kinerja Penyelenggara SPAM

C. Strategi Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi

- e. Pengembangan sistem pengolahan air limbah
- f. Peningkatan kinerja pengelolaan sarana pengolahan air limbah
- g. Menyelenggarakan studi-studi inventarisasi potensi ,masalah, dan kebutuhan infrastruktur permukiman
- h. Pembangunan dan perbaikan saluran drainase
- i. Peningkatan kinerja pengelolaan drainase
- j. Pengembangan sistem pengelolaan sampah
- k. Pengembangan pengelolaan sampah regional
- l. Peningkatan kinerja pengelola sampah

D. Strategi Penataan Ruang

- a. Pengembangan kawasan strategis dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan wilayah
- b. Peningkatan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota
- c. Perumusan peraturan/kebijakan sebagai dasar Pemanfaatan ruang di Jawa Timur

5.4.2 Kebijakan

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

1). Kebijakan Pengembangan Perumahan

- a. Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah
- b. Peningkatan pembangunan PSU di kawasan permukiman
- c. Peningkatan pembangunan jalan usaha tani di kawasan Agropolitan Jawa Timur
- d. Pendidikan dan pelatihan kemasyarakatan produktif melalui jasa konstruksi dalam menghadapi AFTA 2015
- e. Pendampingan dan evaluasi PNPM dan PPIP
- f. Peningkatan penelitian dan pengujian serta penyebaran informasi teknologi dan pengembangan laboratorium perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan
- g. Inventarisasi potensi, masalah, dan kebutuhan infrastruktur permukiman
- h. Renovasi gedung-gedung Negara

2). Kebijakan Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum

- a. Pendataan dan Pemetaan desa-desa rawan air
- b. Pembangunan sapsras penyediaan air minum di daerah rawan air
- c. Melaksanakan fasilitasi SPAM Regional
- d. Penyusunan peraturan pengelolaan Air Minum
- e. Memberikan bantuan teknis kepada Penyelenggara SPAM kategori sakit
- f. Pembinaan penyelenggaraan SPAM

3). Kebijakan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi

- a. Pembangunan sarana prasarana pengolahan air limbah
- b. Penyusunan peraturan pengelolaan air limbah
- c. Memberikan bantuan teknis kepada kelompok pengelola sarana air limbah kategori sakit
- d. Pembinaan pengelolaan sarana air limbah
- e. Inventarisasi potensi, masalah, dan kebutuhan infrastruktur permukiman
- f. Pembangunan dan perbaikan saluran drainase di daerah rawan banjir
- g. Penyusunan peraturan pengelolaan drainase
- h. Pembinaan Pengelolaan Drainase
- i. Pembangunan sarana persampahan
- j. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan sampah regional
- k. Penyusunan peraturan pengelolaan sampah
- l. Pembinaan Pengelolaan sampah

4). Kebijakan Penataan Ruang

- a. Menetapkan Rencana Kawasan Strategis Provinsi dalam mendorong pengembangan wilayah
- b. Fasilitasi Upaya Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh Gubernur
- c. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan ruang
- d. Fasilitasi Upaya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang

Tabel 5.1 Misi
Tujuan dan Sasaran Tahun 2014 - 2019

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan perumahan/permukiman yang layak huni	- Mengurangi backlog perumahan	- Menurunnya jumlah backlog perumahan
			- Meningkatnya pembangunan Rusunawa
		- Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan/permukiman yang lebih baik	- Meningkatnya jumlah renovasi RTLH
			- Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman pada kawasan permukiman (Pembangunan PSU), dan kawasan khusus
			- Meningkatnya dukungan prasarana dan sarana di kawasan agropolitan
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni serta menghadapi persaingan bebas (AFTA 2015) di bidang konstruksi	- Meningkatnya pelatihan dan sertifikasi bidang jasa konstruksi bagi masyarakat pekerja konstruksi
			- Meningkatnya kualitas pelaksanaan PNPM perkotaan, PPIP Perdesaan
	- Menciptakan lingkungan permukiman yang ramah lingkungan melalui teknologi bidang perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan	- Meningkatnya pengembangan teknologi dan informasi bidang perumahan dan permukiman	
		- Meningkatnya penelitian dan pengujian bahan dan struktur bangunan perumahan dan permukiman	
	- Peningkatan kualitas gedung negara	- Meningkatnya kualitas gedung Negara	
	- Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan infrastruktur pada wilayah tertentu	- Tersusunnya program kebutuhan infrastruktur terutama bidang kecipta karya	
2	Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dengan harga terjangkau serta lingkungan permukiman melalui penyehatan lingkungan permukiman	- Meningkatkan pelayanan air bersih	- Meningkatnya sarana dan prasarana AB di desa-desa rawan air
			- Meningkatnya sarana dan prasarana AB di perkotaan dan perdesaan
			- Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum
		- Meningkatkan pelayanan Air Limbah	- Meningkatnya sarana dan prasarana Air Limbah di perkotaan dan perdesaan
			- Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah
			- Meningkatnya kinerja pengelolaan drainase
	- Meningkatkan pelayanan drainase dan persampahan	- Mengoptimalkan saluran drainase sebagai patus air hujan	
		- Meningkatnya sapras persampahan	
		- Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	
3	Meningkatkan penataan ruang provinsi beserta pengendaliannya yang berkelanjutan	- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang wil. Provinsi yg berkelanjutan	- Terwujudnya perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang penataan ruang

Tabel 5.2 Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2014 – 2019

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan perumahan/peremukiman yang layak huni	- Mengurangi backlog perumahan	- Menurunnya jumlah backlog perumahan	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak khususnya bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah	Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah
			- Meningkatnya pembangunan Rusunawa		
		- Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan/peremukiman yang lebih baik	- Meningkatnya jumlah renovasi RTLH	Pembangunan PSU	Peningkatan pembangunan PSU di kawasan permukiman
			- Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman pada kawasan permukiman (Pembangunan PSU), dan kawasan khusus		
			- Meningkatnya dukungan prasarana dan sarana di kawasan agropolitan	Pembangunan jalan usaha tani	Peningkatan pembangunan jalan usaha tani di kawasan Agropolitan Jawa Timur
		- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni serta menghadapi persaingan bebas (AFTA 2015) di bidang konstruksi	- Meningkatnya pelatihan dan sertifikasi bidang jasa konstruksi bagi masyarakat pekerja konstruksi	Pendidikan dan pelatihan kemasyarakatan produktif melalui jasa konstruksi	Pendidikan dan pelatihan kemasyarakatan produktif melalui jasa konstruksi dalam menghadapi AFTA 2015
			- Meningkatnya kualitas pelaksanaan PNPM perkotaan, PPIP Perdesaan	Pendampingan dan evaluasi PNPM dan PPIP	Pendampingan dan evaluasi PNPM dan PPIP
		- Menciptakan lingkungan permukiman yang ramah lingkungan melalui teknologi bidang perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan	- Meningkatkan pengembangan teknologi dan informasi bidang perumahan dan permukiman	Pengembangan teknologi dan informasi serta pengembangan laboratorium perumahan dan permukiman	Peningkatan penelitian dan pengujian serta penyebaran informasi teknologi dan pengembangan laboratorium perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan
			- Meningkatkan penelitian dan pengujian bahan dan struktur bangunan perumahan dan permukiman		
- Peningkatan kualitas gedung negara	- Meningkatnya kualitas gedung negara	Renovasi gedung negara	Renovasi gedung negara		
- Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan infrastruktur pada wilayah tertentu	- Tersusunnya program kebutuhan infrastruktur terutama bidang kecipa karya	Menyelenggarakan studi-studi inventarisasi potensi, masalah, dan kebutuhan infrastruktur permukiman	Inventarisasi potensi, masalah, dan kebutuhan infrastruktur permukiman		
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dengan harga terjangkau serta lingkungan	- Meningkatkan pelayanan air bersih	- Meningkatnya sarana dan prasarana AB di desa-desa rawan air	Pendataan dan Pemetaan desa-desa rawan air	Pendataan dan Pemetaan desa-desa rawan air
			- Meningkatnya sarana dan prasarana AB di perkotaan dan perdesaan	Pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah rawan air	Pembangunan sapsras penyediaan air minum di daerah rawan air

peremukiman melalui penyehatan lingkungan permukiman			Pengembangan sistem penyediaan air minum regional	Melaksanakan fasilitasi SPAM Regional
		- Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum	Peningkatan kinerja Penyelenggara SPAM	Penyusunan peraturan pengelolaan AM Memberikan bantuan teknis kepada Penyelenggara SPAM kategori sakit Pembinaan penyelenggaraan SPAM
	- Meningkatkan pelayanan Air Limbah	- Meningkatnya sarana dan prasarana Air Limbah di perkotaan dan perdesaan	Pengembangan sistem pengolahan air limbah	Pembangunan sarana prasarana pengolahan air limbah
		- Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah	Peningkatan kinerja pengelolaan sarana pengolahan air limbah	Penyusunan peraturan pengelolaan air limbah Memberikan bantuan teknis kepada kelompok pengelola sarana air limbah kategori sakit Pembinaan pengelolaan sarana air limbah
	- Meningkatkan pelayanan drainase dan persampahan	- Mengoptimalkan saluran drainase sebagai pematas air hujan	Pembangunan dan perbaikan saluran drainase	Pembangunan dan perbaikan saluran drainase di daerah rawan banjir
		- Meningkatnya kinerja pengelolaan drainase	Peningkatan kinerja pengelolaan drainase	Penyusunan peraturan pengelolaan drainase Pembinaan Pengelolaan Drainase
		- Meningkatnya sapras persampahan	Pengembangan sistem pengelolaan sampah	Pembangunan sapras persampahan
			Pengembangan pengelolaan sampah regional	Melaksanakan fasilitasi pengelolaan sampah regional
		- Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Peningkatan kinerja pengelola sampah	Penyusunan peraturan pengelolaan sampah Pembinaan Pengelolaan sampah

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3	Meningkatkan penataan ruang provinsi beserta pengendaliannya yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang wil. Provinsi yg berkelanjutan	Terwujudnya perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang penataan ruang	Pengembangan kawasan strategis dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan wilayah	Menetapkan Rencana Kawasan Strategis Provinsi dalam mendorong pengembangan wilayah
				Peningkatan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota	Fasilitasi Upaya Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh Gubernur
				Perumusan peraturan/kebijakan sebagai dasar Pemanfaatan ruang di Jawa Timur	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan ruang
				Peningkatan ketaatan Rencana Tata Ruang di Provinsi Jawa Timur	Fasilitasi Upaya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang

BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1 Program Pengembangan Perumahan

Program ini bertujuan mendorong pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, sehat, aman, dan terjangkau, terutama bagi penduduk miskin dan berpendapatan rendah, melalui penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang, pengembangan Kasiba/Lisiba, serta Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), sekaligus pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perumahan agar tercipta masyarakat yang produktif secara ekonomi dan berkemampuan mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, harmonis dan berkelanjutan, antara lain meliputi:

- a. Penyediaan rumah sederhana sehat, dan prasarana lingkungan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan penduduk miskin.
- b. Pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di perkotaan untuk penduduk miskin, dan masyarakat berpenghasilan rendah
- c. Revitalisasi kawasan kumuh melalui perbaikan lingkungan permukiman
- d. Pemulihan perumahan yang rusak akibat bencana alam
- e. Pengembangan kawasan siap bangun dan/atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar
- f. Fasilitasi bantuan teknis dan pembiayaan perbaikan rumah keluarga miskin yang sangat tak layak huni

- g. Fasilitasi dan bantuan teknis perbaikan rumah pada kawasan kumuh
- h. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat
- i. Fasilitasi kerja sama dengan pengembang dalam pelaksanaan pembangunan perumahan yang layak, sehat, dengan harga yang terjangkau
- j. Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan mengembangkan mekanisme relokasi permukiman ke tempat yang layak, aman, dan sehat, serta mencegah penggusuran tanpa kompensasi yang adil dan layak.
- k. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan
- l. Pengembangan teknologi tepat guna dan penelitian bidang perumahan dan sarana permukiman, untuk menghasilkan perumahan dan permukiman yang sehat, layak, dengan harga terjangkau.

Indikator yang akan dicapai yaitu prosentase rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah, jumlah rusun terbangun, Jumlah Kawasan perumahan yang dibangun PSU nya, dan Jumlah monev renovasi RTLH

6.2 Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum

Program ini bertujuan meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan secara optimal, efisien, dan berkelanjutan, meliputi:

- a. Pembangunan sarana air minum di perkotaan dan pedesaan, meliputi bangunan produksi sampai jaringan distribusi
- b. Pendataan dan identifikasi potensi air baku untuk air minum, dan pengembangan pemanfaatan sumber air secara terintegrasi lintas kabupaten/kota

- c. Pemulihan sarana air minum yang rusak akibat bencana alam
- d. Revitalisasi dan perbaikan sarana air minum untuk menunjang peningkatan pemeliharaan guna pengendalian kebocoran
- e. Menunjang pelaksanaan penyehatan PDAM
- f. Menunjang pelaksanaan pembinaan teknis dan manajemen bagi HIPPAM
- g. Fasilitasi kerjasama instansi pengelola air minum dengan swasta

Indikator yang akan dicapai yaitu prosentase tingkat pelayanan air bersih.

6.3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi

- a. Revitalisasi IPAL/IPLT, dan rintisan pengembangan jaringan pembuangan air limbah di perkotaan
- b. Pembangunan sarana sanitasi dasar bagi rumah tangga maupun komunal di pedesaan, terutama di kawasan permukiman masyarakat miskin.
- c. Peningkatan kualitas pengelolaan sampah, meliputi pengolahan dan pembuangan akhir
- d. Pembangunan dan normalisasi saluran drainase primer dan sekunder lintas kabupaten/kota, untuk menunjang pengendalian banjir di perkotaan
- e. Revitalisasi dan peningkatan operasional tempat pembuangan akhir (TPA) sampah
- f. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan sampah.
- g. Fasilitasi kerja sama pengelolaan sampah terpadu untuk kota-kota besar dan metropolitan
- h. Pembinaan teknis dan manajemen pengelolaan sampah dan drainase.

- i. Fasilitasi kerja sama pengelolaan dengan swasta berdasarkan konsep *bussines plan*
- j. Fasilitasi pengembangan pengelolaan sampah dan drainase yang berbasis masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Indikator yang akan dicapai yaitu prosentase tingkat pelayanan sanitasi

6.4 Program Perencanaan Tata Ruang

Program ini bertujuan mempersiapkan dokumen-dokumen perencanaan tata ruang, melalui penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, serta penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWP;

- a. Fasilitasi Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang
- c. Pemaduserasian RTRW Provinsi Jawa Timur dengan RTRW kabupaten/kota
- d. Perencanaan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh
- e. Fasilitasi Perencanaan Wilayah Perdesaan/Perkotaan
- f. Perencanaan Wilayah Perbatasan
- g. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan kota sedang, besar dan metropolitan

Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio jumlah RTR Kawasan strategis Provinsi

6.5 Program Pemanfaatan Ruang

Program ini bertujuan mewujudkan pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi baik melalui fasilitasi, koordinasi, dan optimalisasi kelembagaan maupun pemanfaatan kawasan strategis, kawasan andalan serta unsur penunjang operasionalisasi RTRWP lainnya.

- a. Sinkronisasi program dan anggaran provinsi
- b. Fasilitasi dan koordinasi antar penataan ruang kabupaten/kota
- c. Pemanfaatan kawasan strategis provinsi
- d. Pemanfaatan kawasan andalan
- e. Pengembangan Detail Kawasan/Wilayah
- f. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang
- g. Sinkronisasi program sektoral dalam perwujudan struktur dan pola ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi
- h. Optimalisasi kelembagaan penataan ruang.

Indikator yang akan dicapai yaitu Presentase ketersediaan Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Tata Ruang

6.6 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program ini bertujuan mewujudkan tertib pemanfaatan ruang melalui penyusunan dan penetapan peraturan zonasi, kebijakan insentif-disinsentif, pemberian ijin pemanfaatan ruang serta penyelesaian masalah tata ruang dan/atau pengenaan sanksi.

- a. Penetapan kebijakan insentif-disinsentif tata ruang.
- b. Perizinan pemanfaatan ruang.
- c. Fasilitasi penyelesaian perselisihan dan/atau pengenaan sanksi permasalahan tata ruang.

- d. Fasilitasi kerjasama tata ruang lintas Kab/Kota
- e. Pelayanan Pengaduan pelanggaran tata ruang

Indikator yang akan dicapai yaitu prosentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

BAB VII

RENCANA ANGGARAN, INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN

Sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur yang dilakukan melalui target-target berupa program dan kegiatan baik yang bersifat regular maupun dukungan terhadap prioritas dan fokus prioritas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana yang telah digambarkan pada table scenario kebutuhan pendanaan, sasaran bidang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur ada 7 (tujuh) prioritas kegiatan antara lain : Program Pengembangan perumahan, Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi, Program Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen SKPD.

**TABEL 7.1. PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET
DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN ANGGARAN 2016**

Urusan	Program	Sasaran Program (sesuai RPJMD)	Indikator Program (sesuai RPJMD)	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja 2016	satuan	Perhitungan Target Kinerja (untuk mencari persentase)
Pekerjaan Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal, serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan publik	Persentase meningkatnya kinerja aparatur terhadap pelaksanaan kegiatan	100%	%	(jumlah aparatur yg terkait) / (jumlah aparatur)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	Presentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana	meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana perkantoran	75%	%	(jumlah pemenuhan sarana dan
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	meningkatnya koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	persentase pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%	%	(jumlah pegawai yg melaksanakan
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pelaksanaan peningkatan SDM Aparatur	55%	%	(jumlah pegawai yg melaksanakan) / (jumlah
	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan	menyusun laporan kinerja pemerintah (Lakip) dan rencana strategis (renstra)	jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	10	dokumen	(jumlah dokumen yg dihasilkan) / (total
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah	Penyediaan Sarana Air Limbah	meningkatnya sarana dan prasarana air limbah di perkotaan dan perdesaan	Persentase KK/RT dengan layanan air limbah yg aman	74,12%	%	(jumlah rumah tangga dg pelayanan air limbah) / (jumlah
				Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air/Plengsengan/Drainase	menurunkan lama genangan pada daerah rawan banjir	persentase capaian pelayanan saluran drainase	82,12%	%	(jumlah RT yg terlayani drainase) / (jumlah Rumah
	Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan	meningkatnya sarana dan prasarana air bersih di perkotaan dan perdesaan	Persentase KK yg dapat layanan air bersih layak	63,96%	%	(jumlah kk yg mendapat pelayanan air bersih) / (jumlah kk
				Pendataan dan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Air	meningkatnya sarana dan prasarana air bersih di desa-desa rawan air	Jumlah dokumen pendataan/pemetaan desa-desa rawan air	10	dokumen	(jumlah daerah rawan air yg didata) / (total daerah
	Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	- Persentase Rusun Terbangun - Jumlah PSU Perumahan Permukiman dan Dokumen Monev RTLH	Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar	meningkatkan penyediaan rumah bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui penyediaan PSU	persentase KK/Masyarakat berpenghasilan rendah yg memiliki rumah layak huni	95,76%	%
Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan/ Perbaikan sarana prasarana kawasan Agropolitan Jawa Timur					meningkatnya kesejahteraan masyarakat usaha tani	Persentase peningkatan kualitas jalan usaha tani	11,5%	%	(jumlah panjang jalan usaha tani terbangun) / (total panjang
Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman					meningkatnya sarana prasarana infrastruktur lingkungan permukiman	persentase peningkatan kualitas jalan lingkungan permukiman	10%	%	(jumlah panjang jalan terbangun) / (total panjang
Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kawasan Khusus					meningkatnya prasarana dan sarana pada kawasan permukiman dan kawasan khusus	persentase peningkatan kualitas jalan lingkungan permukiman pada kawasan khusus	10%	%	(jumlah panjang jalan terbangun) / (total panjang
Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)					meningkatnya penyediaan rusunawa bagi MBR	persentase rusunawa yg dihuni oleh kepala keluarga yg berhak	85%	%	(jumlah rusunawa yg dihuni oleh kk yg berhak) / (jumlah
Dana Pendampingan PNPm					meningkatnya kualitas pelaksanaan PNPm perkotaan, PPIP perdesaan	jumlah OMS dan BKM yang mengikuti pendampingan PPIP maupun PNPm perkotaan	-	Kab/Kota	(jumlah peserta pelatihan) / (total bkm pnpm
Pembangunan/Rehabilitasi bangunan Gedung Pemerintah Propinsi Jatim					peningkatan kualitas gedung kantor dan kenyamanan kerja pegawai	jumlah gedung negara yang dibangun/direnovasi	20	unit	(jumlah gedung yg dibangun/renovasi) / (total
Pendampingan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur					terlaksananya pendampingan RTLH	jumlah dokumen / laporan pengawasan RTLH	20	dokumen	(jumlah RTLH terenovasi) / (total RTLH di Jawa

Urusan	Program	Sasaran Program (sesuai RPJMD)	Indikator Program (sesuai RPJMD)	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja 2016	satuan	Perhitungan Target Kinerja (untuk mencari persentase)	
				Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman	meningkatkan penelitian dan pengujian bahan dan struktur bangunan perumahan dan permukiman	jumlah penelitian teknologi tepat guna	10	dokumen	$(\text{jumlah penelitian})/(\text{jumlah kebutuhan})$	
				Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman	meningkatkan pengembangan data dan informasi bidang perumahan dan permukiman	jumlah penyebaran informasi dan data bidang perumahan dan permukiman	6	dokumen	$(\text{jumlah event yg diselenggarakan})/(\text{jumlah})$	
				Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi	meningkatkan pelatihan dan sertifikasi bidang jasa konstruksi bagi masyarakat pekerja konstruksi	jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan dan sertifikasi bagi pekerja konstruksi	500	orang	$(\text{jumlah peserta pembinaan jasa konstruksi})/(\text{total})$	
				Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan	tersusunnya program kebutuhan infrastruktur pada wilayah perbatasan	jumlah dokumen identifikasi sarana prasarana pada kawasan perbatasan	10	dokumen	$(\text{jumlah dokumen})/(\text{jumlah usulan yg})$	
				Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	tersusunnya program kebutuhan infrastruktur pada kawasan cepat tumbuh	jumlah dokumen identifikasi sarana prasarana infrastruktur pada wilayah strategis dan cepat tumbuh	10	dokumen	$(\text{jumlah dokumen})/(\text{jumlah usulan yg})$	
				Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir	tersusunnya program kebutuhan infrastruktur pada kawasan pesisir	jumlah dokumen identifikasi sarana prasarana pada kawasan pesisir	6	dokumen	$(\text{jumlah dokumen})/(\text{jumlah usulan yg})$	
Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Persentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang tersusun	Rapat koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	tersusunnya perda kawasan strategis provinsi	persentase perda kawasan strategis provinsi	33,33%	%	$(\text{jumlah Perda RTR KSP})/(\text{total kebutuhan KSP yg diperdakan (18)})\times 100\%$	
			Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang Kab/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi	meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang yg dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian masyarakat	persentase Jumlah Persetujuan Substansi KSP di Jawa Timur	44,44%	%	$(\text{jumlah persetujuan subs. KSP})/(\text{total kebutuhan KSP yg diperdakan (18)})\times 100\%$	
				Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi	tersusunnya rencana rinci kawasan strategis	persentase terpenuhinya RTR kawasan strategis di jatim	69,23%	%	$(\text{jumlah kawasan strategis yg tersusun})/(\text{total jumlah kawasan strategis di jatim})$	
	Program Pemanfaatan Ruang		Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang	Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang	terwujudnya perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang penataan ruang	persentase terpenuhinya kebutuhan buku pedoman norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang	25%	%	$(\text{jumlah buku pedoman norma, standar dan kriteria})/(\text{total})$	
				Survey dan Pemetaan	terwujudnya 38 buah peta RDTR dan Peta LP2B Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Persentase jumlah peta RDTR dan Peta LP2B Kabupaten/Kota di Jawa Timur	21,05%	%	$(\text{jumlah peta RDTR \& LP2B yg tersusun})/(\text{jumlah kebutuhan peta RDTR\&LP2B})$	
				Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar Prosedur dan manual Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Pemahaman Sumber Daya Manusia terkait NSPK Pemanfaatan Ruang	persentase tercapainya sosialisasi kebijakan NSPK pemanfaatan ruang	100%	%	$(\text{jumlah peserta yg hadir})/(\text{total peserta yang di undang})\times 100\%$	
				Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota	Terfasilitasinya permasalahan terkait pemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota	persentase jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi permasalahan terkait pemanfaatan ruang	100%	%	$(\text{jumlah kab/kota yg terfasilitasi})/(\text{jumlah kab-kota})\times 100\%$	
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	terwujudnya evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang	persentase terpenuhinya kebutuhan dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	100%	%	$(\text{jumlah dokumen evaluasi})/(\text{total dokumen yg})$
					Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Pemahaman Sumber Daya Manusia Aparat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase Aparat pengendalian pemanfaatan ruang yang terlatih	100%	%	$(\text{jumlah peserta pelatihan yg hadir})/(\text{total peserta yg diundang})\times 100\%$
				Pengawasan Pemanfaatan Ruang	terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang di kab/kota	jumlah dokumen laporan survey	1	dokumen	$(\text{jumlah kab-kota yg dilakukan pengawas an})/(\text{jumlah kab-kota jatim})\times 100\%$	
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota	Terfasilitasinya permasalahan terkait pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota	persentase jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi permasalahan terkait pengendalian pemanfaatan ruang	100%	%	$(\text{jumlah kab-kota yg terfasilitasi})/(\text{jumlah kab-kota})\times 100\%$	
				Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Pemahaman Sumber Daya Manusia terkait kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	jumlah peserta yang mendapat sosialisasi tentang kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	100%	%	$(\text{jumlah peserta sosialisasi yg hadir})/(\text{total peserta yg diundang})\times 100\%$	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terkait penataan ruang	jumlah laporan Monitoring dan evaluasi penataan ruang di Jawa Timur	1	dokumen	$(\text{jumlah kab-kota yg dilakukan monev})/(\text{jumlah kab-kota})\times 100\%$		

TABEL. 7.2. USULAN ANGGARAN DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan	Program	Sasaran Program (sesuai RPJMD)	Indikator Program (sesuai RPJMD)	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja 2016	satuan	ANGGARAN (Rp)
Pekerjaan Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal, serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan publik	Persentase meningkatnya kinerja aparatur terhadap pelaksanaan kegiatan	100%	%	2.900.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana	meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana perkantoran	75%	%	2.600.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	meningkatnya koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	persentase pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%	%	1.200.000.000
	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pelaksanaan peningkatan SDM Aparatur	55%	%	400.000.000
				Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan	menyusun laporan kinerja pemerintah (Lakip) dan rencana strategis (renstra)	jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	10	dokumen	200.000.000
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah	Penyediaan Sarana Air Limbah	meningkatnya sarana dan prasarana air limbah di perkotaan dan perdesaan	Persentase KK/RT dengan layanan air limbah yg aman	74,12%	%	2.500.000.000
				Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air/Plengsengan/Drainase	menurunkan lama genangan pada daerah rawan banjir	persentase capaian pelayanan saluran drainase	82,12%	%	7.000.000.000
	Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum		Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan	meningkatnya sarana dan prasarana air bersih di perkotaan dan perdesaan	Persentase KK yg dapat layanan air bersih layak	63,96%	%	25.000.000.000
				Pendataan dan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Air	meningkatnya sarana dan prasarana air bersih di desa-desa rawan air	jumlah dokumen pendataan/pemetaan desa-desa rawan air	10	dokumen	2.000.000.000
	Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	- Persentase Rusun Terbangun - Jumlah PSU Perumahan Permukiman dan Dokumen Monev RTLH	Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar	meningkatkan penyediaan rumah bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui penyediaan PSU	persentase KK/Masyarakat berpenghasilan rendah yg memiliki rumah layak huni	95,76%	%
Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan/ Perbaikan sarana prasarana kawasan Agropolitan Jawa Timur					meningkatnya kesejahteraan masyarakat usaha tani	Persentase peningkatan kualitas jalan usaha tani	11,5%	%	3.000.000.000
Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman					meningkatnya sarana prasarana infrastruktur lingkungan permukiman	persentase peningkatan kualitas jalan lingkungan permukiman	10%	%	11.000.000.000
Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kawasan Khusus					meningkatnya prasarana dan sarana pada kawasan permukiman dan kawasan khusus	persentase peningkatan kualitas jalan lingkungan permukiman pada kawasan khusus	10%	%	3.000.000.000
Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)					meningkatnya penyediaan rusunawa bagi MBR	persentase rusunawa yg dihuni oleh kepala keluarga yg berhak	85%	%	35.860.000.000
Dana Pendampingan PNPM					meningkatnya kualitas pelaksanaan PNPM perkotaan , PPIP perdesaan	jumlah OMS dan BKM yang mengikuti pendampingan PPIP maupun PNPM perkotaan	-	Kab/Kota	-
Pembangunan/Rehabilitasi bangunan Gedung Pemerintah Propinsi Jatim					peningkatan kualitas gedung kantor dan kenyamanan kerja pegawai	jumlah gedung negara yang dibangun/direnovasi	20	unit	98.000.000.000
Pendampingan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur					terlaksananya pendampingan RTLH	jumlah dokumen /laporan pengawasan RTLH	20	dokumen	2.000.000.000

Urusan	Program	Sasaran Program (sesuai RPJMD)	Indikator Program (sesuai RPJMD)	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja 2016	satuan	ANGGARAN (Rp)
				Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman	meningkatnya penelitian dan pengujian bahan dan struktur bangunan perumahan dan permukiman	jumlah penelitian teknologi tepat guna	10	dokumen	2.500.000.000
				Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman	meningkatnya pengembangan data dan informasi bidang perumahan dan permukiman	jumlah penyebaran informasi dan data bidang perumahan dan permukiman	6	dokumen	2.000.000.000
				Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi	meningkatnya pelatihan dan sertifikasi bidang jasa konstruksi bagi masyarakat pekerja konstruksi	jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan dan sertifikasi bagi pekerja konstruksi	500	orang	1.500.000.000
				Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan	tersusunnya program kebutuhan infrastruktur pada wilayah perbatasan	jumlah dokumen identifikasi sarana prasarana pada kawasan perbatasan	10	dokumen	1.500.000.000
				Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	tersusunnya program kebutuhan infrastruktur pada kawasan cepat tumbuh	jumlah dokumen identifikasi sarana prasarana infrastruktur pada wilayah strategis dan cepat tumbuh	10	dokumen	1.500.000.000
				Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir	tersusunnya program kebutuhan infrastruktur pada kawasan pesisir	jumlah dokumen identifikasi sarana prasarana pada kawasan pesisir	6	dokumen	1.000.000.000
Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Persentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang tersusun	Rapat koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	tersusunnya perda kawasan strategis provinsi	persentase perda kawasan strategis provinsi	33,33%	%	500.000.000
			Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang Kab/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi	meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang yg dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian masyarakat	persentase Jumlah Persetujuan Substansi KSP di Jawa Timur	44,44%	%	2.500.000.000
				Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi	tersusunnya rencana rinci kawasan strategis	persentase terpenuhinya RTR kawasan strategis di jatim	69,23%	%	2.000.000.000
	Program Pemanfaatan Ruang		Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang	Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang	terwujudnya perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang penataan ruang	persentase terpenuhinya kebutuhan buku pedoman norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang	25%	%	500.000.000
				Survey dan Pemetaan	terwujudnya 38 buah peta RDTR dan Peta LP2B Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Persentase jumlah peta RDTR dan Peta LP2B Kabupaten/Kota di Jawa Timur	21,05%	%	2.500.000.000
				Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar Prosedur dan manual Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Pemahaman Sumber Daya Manusia terkait NSPK Pemanfaatan Ruang	persentase tercapainya sosialisasi kebijakan NSPK pemanfaatan ruang	100%	%	400.000.000
				Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota	Terfasilitasinya permasalahan terkait pemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota	persentase jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi permasalahan terkait pemanfaatan ruang	100%	%	500.000.000
				Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	terwujudnya evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang	persentase terpenuhinya kebutuhan dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	100%	%	1.000.000.000
				Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Pemahaman Sumber Daya Manusia Aparat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase Aparat pengendalian pemanfaatan ruang yang terlatih	100%	%	500.000.000
				Pengawasan Pemanfaatan Ruang	terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang di kab/kota	jumlah dokumen laporan survey	1	dokumen	200.000.000
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota	Terfasilitasinya permasalahan terkait pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota	persentase jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi permasalahan terkait pengendalian pemanfaatan ruang	100%	%	200.000.000
				Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Pemahaman Sumber Daya Manusia terkait kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	jumlah peserta yang mendapat sosialisasi tentang kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	100%	%	200.000.000
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terkait penataan ruang	jumlah laporan Monitoring dan evaluasi penataan ruang di Jawa Timur	1	dokumen	200.000.000
TOTAL									232.860.000.000

BAB VIII

PENUTUP

Dari uraian permasalahan dan program pembangunan bidang perumahan dan permukiman di Jawa Timur, antara lain dapat disimpulkan bahwa capaian pelayanan (% penduduk terlayani) bidang permukiman (Air Bersih, Sampah, Air Limbah, dan Drainase) sampai dengan tahun 2019 masih relatif rendah terhadap target sesuai Nasional Action Plan/MDGs.

Untuk memenuhi kebutuhan sesuai capaian pelayanan sampai dengan 2019 sesuai target ideal berdasarkan MDGs diperlukan dana yang sangat besar (\pm 10 trilyun rupiah) sedangkan berdasarkan kemampuan alokasi pendanaan dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota secara rata-rata maksimum hanya \pm 5 % dari total kebutuhan dana. Dengan demikian target capaian pelayanan bidang permukiman sampai dengan akhir periode perencanaan tahun 2019 dijustifikasi secara realistis hanya 5 % dari target ideal. Selain itu permasalahan perumahan dan permukiman tidak cukup hanya diselesaikan melalui manajemen pembangunan infrastruktur, namun perlu didukung dengan manajemen konservasi lingkungan untuk mempertahankan sumber daya alam melalui penataan ruang secara komprehensif.

Berdasarkan komposisi alokasi dana pemerintah pada 2 tahun terakhir, maka guna menjamin konsistensi terlaksananya program sesuai dokumen perencanaan pembangunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Propinsi Jawa Timur 2014-2019 ini perlu didukung dengan komitmen pendanaan pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dengan proporsi prosentase 35 : 25 : 40.